



---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundangundangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 adalah

- 1) Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya



---

ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- 2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 3) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 4) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas



- 
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7



- 
- Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024,
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
  - o. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024;  
(Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 48)
  - p. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024;

### **1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan



---

**Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro / Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan APBD**

- 3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan

**Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dgn Ketentuan yang Ada Dalam SAP

**Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran – LRA SKPD
- 5.2. Laporan Operasional – LO SKPD
- 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas – LPE SKPD
- 5.4. Neraca SKPD
- 5.5. Catatan atas Laporan Keuangan – CaLK SKPD

**Bab VI Informasi Non Keuangan**

**Bab VII Penutup**



---

## BAB II

### EKOMOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi makro suatu daerah antara lain, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan perkapita dan kemiskinan. Gambar indikator tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Atas dasar kondisi makro ini maka ditetapkan belanja daerah Kabupaten Flores Timur anggaran untuk Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 sebesar Rp. 11.149.328.782,00

#### 2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

##### 2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Anggaran Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp 0,00 dengan realisasi sebesar Rp 0 kondisi pendapatan terserap sebesar 0 %.

##### 2.2.2. Kebijakan Belanja

Kebijakan Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added), sesuai capaian target visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)



## Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

yang disusun secara terukur dengan memperhatikan kaedah-kaedah perencanaan.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur pada Tahun Anggaran 2024 mengelolah Anggaran sebesar Rp. 11.149.328.782,00 dana tersebut dialokasikan untuk :

Belanja Daerah : Rp. 11.149.328.782,00

1. Belanja Operasi : Rp. 10.811.963.782,00

2. Belanja Modal : Rp. 337.365.000,00

Belanja Daerah pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 11.149.328.782,00 dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 9.437.113.597,00 dengan kondisi Belanja tersebut di atas diserap sebesar 84,64%.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian kinerja pada Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Adalah sebagai berikut

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran
1	2	3
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11.149.328.782,00</b>
<b>2.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.947.736.273,00</b>
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.082.540,00
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.719.600,00
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.999.700,00
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.860,00
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.363.380,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.454.552.353,00
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.366.052.353,00
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73.500.000,00



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.999.700,00
2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.700,00
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.998.000,00
2.08.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.998.000,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.019.655,00
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.990.995,00
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.950.750,00
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.001.270,00
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.175.020,00
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.206.620,00
2.08.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	11.500.000,00
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.195.000,00
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.365.000,00
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.165.000,00
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.200.000,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.984.400,00
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.499.400,00
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.285.000,00
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.200.000,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.734.625,00
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.495.000,00
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.059.625,00
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.130.000,00



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.050.000,00
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>74.999.086,00</b>
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.652,00
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	19.999.652,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.742,00
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	29.999.742,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.999.692,00
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.999.692,00
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>70.000.000,00</b>
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000,00
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>115.146.712,00</b>
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.999.830,00
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	34.999.830,00



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.149.292,00
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.632,00
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.149.660,00
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.997.590,00
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.997.590,00
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>19.999.900,00</b>
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.999.900,00
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.900,00
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>49.998.930,00</b>
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.760,00
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.760,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.170,00
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.690,00
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.999.480,00
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>362.234.770,00</b>



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	362.234.770,00
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	59.999.920,00
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	176.400.000,00
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	107.835.000,00
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	2.999.850,00
2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	15.000.000,00
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>5.306.013.559,00</b>
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.512.514.000,00
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	51.530.000,00
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	781.564.000,00
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	328.700.000,00
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	101.750.000,00
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	248.970.000,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	750.000.000,00
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	750.000.000,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.653.449.859,00



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.500.000,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.105.700.239,00
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.450.000,00
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	496.800.000,00
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	19.999.620,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	390.049.700,00
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	29.999.700,00
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4.800.000,00
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	355.250.000,00
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>2.203.199.552,00</b>
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	628.199.552,00
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	7.600.000,00
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	620.599.552,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.575.000.000,00



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

*Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024*

<b>Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	750.000.000,00
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	825.000.000,00



---

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN APBD**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2024.

**3.1.1. Pendapatan**

Realisasi pendapatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 sebesar Rp 0,- dari target sebesar Rp 0,- (0.00 %)

**3.1.2. Belanja**

**Realisasi Belanja**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur pada Tahun Anggaran 2024 mengelola anggaran sebesar Rp. 11.149.328.782 yang dialokasikan untuk:

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Belanja Operasi | : Rp. 10.811.963.782,00 |
| Terealisasi        | : Rp. 9.102.413.597,00  |
| 2. Belanja Modal   | :Rp. 337.365.000,00     |
| Terealisasi        | :Rp. 334.700.000,00     |

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut: Rincian Belanja tersebut adalah sebagai berikut:



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Tabel. Belanja Daeah Dinas P2KBP3A Kab. Flores Timur Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11.149.328.782,00</b>	<b>9.437.113.597,00</b>	<b>84,64</b>	<b>11.229.163.600,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.811.963.782,00</b>	<b>9.102.413.597,00</b>	<b>84,19</b>	<b>10.262.092.600,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.444.302.353,00	2.356.680.094,00	96,42	2.200.284.992,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.879.955.650,00	1.852.538.526,00	98,54	1.804.528.822,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	486.096.703,00	450.191.568,00	92,61	335.656.170,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	78.250.000,00	53.950.000,00	68,95	60.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.367.661.429,00	6.745.733.503,00	80,62	8.061.807.608,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.520.692.429,00	1.131.850.121,00	74,43	1.539.474.455,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.120.179.000,00	1.318.528.633,00	62,19	5.763.827.072,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	31.300.000,00	30.870.000,00	98,63	126.680.801,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.015.290.000,00	1.785.684.749,00	88,61	631.825.280,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.680.200.000,00	2.478.800.000,00	92,49	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>337.365.000,00</b>	<b>334.700.000,00</b>	<b>99,21</b>	<b>967.071.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	337.365.000,00	334.700.000,00	99,21	967.071.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	4.107.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.200.000,00	7.100.000,00	98,61	265.073.700,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	138.700.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	131.250.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	330.165.000,00	327.600.000,00	99,22	427.940.300,00

Sedangkan Realisasi kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

**Tabel. Realisasi Program Kegiatan Pada Dinas P2KBP3A  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2024**

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Pagu Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11.149.328.782,00</b>	<b>9.437.113.597,00</b>	<b>1.712.215.185,00</b>	<b>84,64</b>
<b>2.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.947.736.273,00</b>	<b>2.840.078.260,00</b>	<b>107.658.013,00</b>	<b>96,35</b>
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.082.540,00	59.602.800,00	479.740,00	99,20
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.719.600,00	26.615.300,00	104.300,00	99,61
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.999.700,00	9.880.000,00	119.700,00	98,80
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.860,00	9.750.000,00	249.860,00	97,50
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.363.380,00	13.357.500,00	5.880,00	99,96
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.454.552.353,00	2.366.863.393,00	87.688.960,00	96,43
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.366.052.353,00	2.302.730.094,00	63.322.259,00	97,32
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73.500.000,00	49.200.000,00	24.300.000,00	66,94
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	14.933.299,00	66.701,00	99,56
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.999.700,00	9.176.700,00	823.000,00	91,77
2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.700,00	9.176.700,00	823.000,00	91,77
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.998.000,00	9.915.000,00	83.000,00	99,17
2.08.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.998.000,00	9.915.000,00	83.000,00	99,17
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.019.655,00	134.173.020,00	1.846.635,00	98,64
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.990.995,00	1.987.500,00	3.495,00	99,82



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Pagu	%
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.950.750,00	4.950.750,00	0,00	100,00
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.001.270,00	6.751.500,00	249.770,00	96,43
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.175.020,00	31.106.000,00	69.020,00	99,78
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.206.620,00	20.206.500,00	120,00	100,00
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.500.000,00	10.200.000,00	1.300.000,00	88,70
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.195.000,00	58.970.770,00	224.230,00	99,62
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.365.000,00	35.700.000,00	1.665.000,00	95,54
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.165.000,00	28.600.000,00	1.565.000,00	94,81
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.200.000,00	7.100.000,00	100.000,00	98,61
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.984.400,00	127.661.000,00	6.323.400,00	95,28
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.499.400,00	1.498.400,00	1.000,00	99,93
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.285.000,00	24.962.600,00	6.322.400,00	79,79
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.200.000,00	101.200.000,00	0,00	100,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.734.625,00	96.986.347,00	8.748.278,00	91,73
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.495.000,00	77.911.722,00	8.583.278,00	90,08
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.059.625,00	10.059.625,00	0,00	100,00
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	100,00
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.050.000,00	6.885.000,00	165.000,00	97,66



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Pagu	%
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>74.999.086,00</b>	<b>70.599.086,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>94,13</b>
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.652,00	18.659.652,00	1.340.000,00	93,30
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	19.999.652,00	18.659.652,00	1.340.000,00	93,30
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.742,00	28.559.742,00	1.440.000,00	95,20
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	29.999.742,00	28.559.742,00	1.440.000,00	95,20
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.999.692,00	23.379.692,00	1.620.000,00	93,52
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.999.692,00	23.379.692,00	Rp1.620.000,00	93,52
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>29.210.000,00</b>	<b>40.790.000,00</b>	<b>41,73</b>
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	29.210.000,00	40.790.000,00	41,73
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000,00	29.210.000,00	40.790.000,00	41,73
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS</b>	<b>115.146.712,00</b>	<b>113.469.112,00</b>	<b>1.677.600,00</b>	<b>98,54</b>



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Pagu	%
	<b>KELUARGA</b>				
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.999.830,00	34.999.830,00	0	100,00
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	34.999.830,00	34.999.830,00	0	100,00
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.149.292,00	54.536.692,00	612.600,00	98,89
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.632,00	29.509.632,00	490.000,00	98,37
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.149.660,00	25.027.060,00	122.600,00	99,51
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.997.590,00	23.932.590,00	1.065.000,00	95,74
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.997.590,00	23.932.590,00	1.065.000,00	95,74
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>19.999.900,00</b>	<b>19.704.300,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>98,52</b>



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Pagu	%
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.999.900,00	19.704.300,00	70.000,00	98,52
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.900,00	19.704.300,00	70.000,00	98,52
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>49.998.930,00</b>	<b>49.928.930,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>99,86</b>
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.760,00	19.934.760,00	65.000,00	99,67
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.760,00	19.934.760,00	65.000,00	99,67
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.170,00	29.994.170,00	5.000,00	99,98
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.690,00	19.994.690,00	5.000,00	99,97
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.999.480,00	9.999.480,00	0	100,00
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>362.234.770,00</b>	<b>357.483.567,00</b>	<b>4.751.203,00</b>	<b>98,69</b>
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	362.234.770,00	357.483.567,00	4.751.203,00	98,69
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	59.999.920,00	59.819.000,00	180.920,00	99,70
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	176.400.000,00	176.400.000,00	0	100,00



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Pagu	%
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	107.835.000,00	103.264.717,00	4.570.283,00	95,76
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	2.999.850,00	2.999.850,00	0	100,00
2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	15.000.000,00	15.000.000,00	0	100,00
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>5.306.013.559,00</b>	<b>3.754.690.550,00</b>	<b>1.551.323.009,00</b>	<b>70,76</b>
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.512.514.000,00	1.485.393.230,00	27.120.770,00	98,21
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	51.530.000,00	51.530.000,00	0,00	100,00
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	781.564.000,00	781.564.000,00	0,00	100,00
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	328.700.000,00	328.700.000,00	0,00	100,00
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	101.750.000,00	97.595.650,00	4.154.350,00	95,92
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	248.970.000,00	226.003.580,00	22.966.420,00	90,78
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	100,00
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	100,00



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Pagu	%
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.653.449.859,00	1.129.328.120,00	1.524.121.739,00	42,56
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.500.000,00	12.500.000,00	0	100,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.105.700.239,00	788.588.500,00	1.317.111.739,00	37,45
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.450.000,00	18.440.000,00	10.000,00	99,95
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	496.800.000,00	289.800.000,00	207.000.000,00	58,33
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	19.999.620,00	19.999.620,00	0	100,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	390.049.700,00	389.969.200,00	80.500,00	99,98
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	29.999.700,00	29.919.200,00	80.500,00	99,73
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4.800.000,00	4.800.000,00	0	100,00
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	355.250.000,00	355.250.000,00	0	100,00
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>2.203.199.552,00</b>	<b>2.201.949.792,00</b>	<b>1.249.760,00</b>	<b>99,94</b>



## Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Pagu	%
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	628.199.552,00	626.949.792,00	1.249.760,00	99,80
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	620.599.552,00	619.349.792,00	1.249.760,00	99,80
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00	100,00
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	100,00
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	100,00

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dapat dilihat masih adanya kegiatan yang belum terealisasi 100%. Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi yang tidak optimal antara lain disebabkan SDM aparatur yang belum memadai, sarana dan prasaran yang belum optimal, masih adanya kekhawatiran akan adanya kesalahan



## Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

*Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024*

---

dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang setiap tahunnya mengalami perubahan.



---

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN**

### **AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Dalam Standart Akuntansi Pemerintah ( SAP ) mengenal adanya dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan suatu entitas Akuntansi maka pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan, yang akan disampaikan secara berjenjang kepada Bupati dalam hal ini bagian Keuangan dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Dasar akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah dengan Basis Kas atau pengakuan penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran Kas. Sehingga dasar dalam penyusunan laporan adalah dari Surat Pertanggung jawaban yang telah disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya akan difertifikasi oleh PPK SKPD. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut.

##### **4.3.1 Kas**

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 30 Desember 2024. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada



---

pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 30 Desember 2024. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

#### 4.3.2 Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  - b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa :
    - (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
    - (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
    - (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
    - (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 1) Pengakuan Persediaan
    - a) Persediaan diakui :
      - (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
      - (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
    - b) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
  - 2) Pengukuran Persediaan
    - a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)* atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barangbarang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.



b) Persediaan disajikan sebesar :

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
  - a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
  - b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan :
    - (1) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
    - (2) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### 4.3.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden



---

dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

#### 4.3.4 Aset Tetap

##### Definisi Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e) Masa manfaat adalah :
  - (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h) Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



- 
- j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak mudah rusak dan dalam kondisi siap pakai.
- k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- l) Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :
- (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
  - (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
  - (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
  - (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
- o) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- 1) Pengakuan Aset Tetap
    - a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
    - b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
      - (1) Berwujud;
      - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
      - (3) Tidak mudah rusak;



- 
- (4) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - (5) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - (6) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - (7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
  - d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
  - e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah dikuasai, diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 2) Pengukuran Aset Tetap
- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
  - b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  - c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
  - d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

- e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi dan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi, jasa konsultasi



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Jaringan	perencanaan dan pengawasan, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

#### 4.3.5 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

- (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- (4) Aset Tidak Berwujud;
- (5) Aset Lain-lain;

#### 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

*Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024*

---

64 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua  
Pada Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan  
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi patokan pengklasifikasian dan kode  
belanja pada saldo awal Tahun Anggaran 2024.



---

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan basis Akrual yang disajikan adalah pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut.

#### 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

##### 5.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LRA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah – LRA, pendapatan transfer – LRA dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah – LRA.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur tidak mengelolah akun Pendapatan – LRA.

##### 5.1.2 Belanja

Belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal

Realisasi Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode yang berakhir sampai dengan 31 desember 2024 adalah sebesar Rp 9.437.113.597,00 atau 84,64% dari anggaran belanja sebesar Rp. 11.149.328.782,00

Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Tabel. Realisasi Belanja Daerah Pada Dinas P2KBP3A Kab. Flores Timur Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11.149.328.782,00</b>	<b>9.437.113.597,00</b>	<b>84,64</b>	<b>11.229.163.600,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.811.963.782,00</b>	<b>9.102.413.597,00</b>	<b>84,19</b>	<b>10.262.092.600,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.444.302.353,00	2.356.680.094,00	96,42	2.200.284.992,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.879.955.650,00	1.852.538.526,00	98,54	1.804.528.822,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	486.096.703,00	450.191.568,00	92,61	335.656.170,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	78.250.000,00	53.950.000,00	68,95	60.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.367.661.429,00	6.745.733.503,00	80,62	8.061.807.608,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.520.692.429,00	1.131.850.121,00	74,43	1.539.474.455,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.120.179.000,00	1.318.528.633,00	62,19	5.763.827.072,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	31.300.000,00	30.870.000,00	98,63	126.680.801,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.015.290.000,00	1.785.684.749,00	88,61	631.825.280,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.680.200.000,00	2.478.800.000,00	92,49	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>337.365.000,00</b>	<b>334.700.000,00</b>	<b>99,21</b>	<b>967.071.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	337.365.000,00	334.700.000,00	99,21	967.071.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	4.107.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.200.000,00	7.100.000,00	98,61	265.073.700,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	138.700.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	131.250.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	330.165.000,00	327.600.000,00	99,22	427.940.300,00

#### 5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah

Realisasi Belanja Operasi periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 9.102.413.597,00 atau 84,19% dari



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

anggaran belanja sebesar Rp 10.811.963.782,00 dan untuk Tahun 2024 sebesar RP. 10.262.092.600,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Operasi periode yang berakhir sampai 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6
5.1	BELANJA OPERASI	10.811.963.782,00	9.102.413.597,00	84,19	10.262.092.600,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.444.302.353,00	2.356.680.094,00	96,42	2.200.284.992,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.367.661.429,00	6.745.733.503,00	80,62	8.061.807.608,00

**5.1.2.1.1 Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.356.680.094,00, atau 96,42% dari anggaran sebesar Rp 2.444.302.353,00. dan untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 2.200.284.992,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Pegawai periode yang berakhir sampai 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6
5.1.01	Belanja Pegawai	2.444.302.353,00	2.356.680.094,00	96,42	2.200.284.992,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.879.955.650,00	1.852.538.526,00	98,54	1.804.528.822,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan	486.096.703,00	450.191.568,00	92,61	335.656.170,00



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	ASN				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	78.250.000,00	53.950.000,00	68,95	60.100.000,00

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 6.745.733.503,00 atau 80,62% dari anggaran belanja sebesar Rp 8.367.661.429,00, dan untuk Tahun 2023 sebesar Rp 8.061.807.608,00- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2021

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$\frac{4}{3} \times 100$	6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.367.661.429,00	6.745.733.503,00	80,62	8.061.807.608,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.520.692.429,00	1.131.850.121,00	74,43	1.539.474.455,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.120.179.000,00	1.318.528.633,00	62,19	5.763.827.072,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	31.300.000,00	30.870.000,00	98,63	126.680.801,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.015.290.000,00	1.785.684.749,00	88,61	631.825.280,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.680.200.000,00	2.478.800.000,00	92,49	0,00



### 5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 334.700.000,00 atau 99,21% dari anggaran belanja sebesar Rp 337.365.000,00,- dan untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 967.071.000,00-

Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>337.365.000,00</b>	<b>334.700.000,00</b>	<b>99,21</b>	<b>967.071.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	337.365.000,00	334.700.000,00	99,21	967.071.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	4.107.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.200.000,00	7.100.000,00	98,61	265.073.700,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	138.700.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	131.250.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	330.165.000,00	327.600.000,00	99,22	427.940.300,00

## 5.2 LAPORAN OPERASIONAL – LO SKPD

### 5.2.1 Pendapatan - LO

### 5.2.2 Beban – LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Rekening Beban pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur pada Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp. 9.995.297.383,00 dan Rp. 10.992.931.554,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp. (997.634.170,31) atau (9,08%) dengan Rinciannya sebagai berikut :



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Tabel. Beban LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	KODE	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
<b>BEBAN</b>	<b>5.4.2</b>	<b>9.995.297.383,69</b>	<b>10.992.931.554,00</b>	<b>- 997.634.170,31</b>	<b>- 9,08</b>
<b>BEBAN OPERASI</b>		<b>9.149.052.050,00</b>	<b>9.846.820.359,00</b>	<b>- 697.768.309,00</b>	<b>- 7,09</b>
Beban Pegawai	5.4.2.1	2.355.680.094,00	2.182.284.992,00	173.395.102,00	7,95
Beban Barang	5.4.2.2	1.181.168.574,00	1.218.776.964,00	- 37.608.390,00	- 3,09
Beban Jasa	5.4.2.3	1.316.848.633,00	5.763.827.072,00	- 4.446.978.439,00	- 77,15
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	30.870.000,00	74.026.051,00	- 43.156.051,00	- 58,30
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	1.785.684.749,00	607.905.280,00	1.177.779.469,00	193,74
Beban Belanja Uang / Jasa yang diberikan kepada Pihak ketiga		2.478.800.000,00	-	2.478.800.000,00	-
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>5.4.2.11</b>	<b>846.245.333,69</b>	<b>1.146.111.195,00</b>	<b>- 299.865.861,31</b>	<b>- 26,16</b>

### 5.2.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2.355.680.094,00 dan Tahun 2023 Rp. 2.182.284.992,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 173.395.102,00 atau mencapai 7,95%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Beban Pegawai Periode 31 Desember 2024 dan 2023

KODE REK	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
5.1.01	Beban Pegawai	2.355.680.094,00	2.182.284.992,00	173.395.102,00	7,95
5.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.852.538.526,00	1.804.528.822,00	48.009.704,00	2,66



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

KODE REK	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
5.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.409.196.100,00	1.429.327.600,00	(20.131.500,00)	-1,41
5.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.258.871.300,00	1.417.461.600,00	(158.590.300,00)	-11,19
5.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	150.324.800,00	11.866.000,00	138.458.800,00	1166,85
5.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	92.393.058,00	93.195.910,00	(802.852,00)	-0,86
5.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	80.603.810,00	91.653.330,00	(11.049.520,00)	-12,06
5.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	11.789.248,00	1.542.580,00	10.246.668,00	664,26
5.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	115.950.000,00	196.230.000,00	(80.280.000,00)	-40,91
5.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	115.950.000,00	196.230.000,00	(80.280.000,00)	-40,91
5.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	153.581.000,00	2.160.000,00	151.421.000,00	7010,23
5.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	24.120.000,00	2.160.000,00	21.960.000,00	1016,67
5.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.920.000,00	19.210.000,00	(1.290.000,00)	-6,72
5.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.920.000,00	19.210.000,00	(1.290.000,00)	-6,72
5.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	58.515.360,00	60.036.180,00	(1.520.820,00)	-2,53
5.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	49.824.960,00	59.022.300,00	(9.197.340,00)	-15,58
5.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	8.690.400,00	1.013.880,00	7.676.520,00	757,14
5.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.958.324,00	4.342.231,00	616.093,00	14,19
5.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	24.684,00	26.901,00	(2.217,00)	-8,24
5.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	21.858,00	26.695,00	(4.837,00)	-18,12
5.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.826,00	206,00	2.620,00	1271,84
5.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	450.191.568,00	335.656.170,00	114.535.398,00	34,12



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

KODE REK	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
5.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	178.996.632,00	133.182.414,00	45.814.218,00	34,40
5.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	167.336.472,00	133.182.414,00	34.154.058,00	25,64
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00
5.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00
5.1.01.02.04	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	#DIV/0!
5.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	268.494.936,00	199.773.756,00	68.721.180,00	34,40
5.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	251.004.696,00	199.773.756,00	51.230.940,00	25,64
5.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.950.000,00	42.100.000,00	10.850.000,00	25,77
5.1.01.03.07	Beban Honorarium	52.950.000,00	42.100.000,00	10.850.000,00	25,77
5.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	49.200.000,00	41.100.000,00	8.100.000,00	19,71
5.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.750.000,00	1.000.000,00	2.750.000,00	275,00

### 5.2.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2024 adalah Rp. 6.793.371.956,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 7.664.535.367,00 mengalami penurunan sebesar



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Rp. (871.163.411,00), atau pencapaian sebesar (11,37)%. Rincian beban Barang dan jasa periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

Tabel. Beban Persediaan Periode 31 Desember 2024 dan 2023

KODE REK	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>5.1.02</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>6.793.371.956,00</b>	<b>7.664.535.367,00</b>	<b>(871.163.411,00)</b>	<b>-11,37</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Beban Barang</b>	<b>1.181.168.574,00</b>	<b>1.218.776.964,00</b>	<b>(37.608.390,00)</b>	<b>-3,09</b>
5.1.02.01.01	<b>Beban</b> Barang Pakai Habis	1.174.068.574,00	1.218.776.964,00	(44.708.390,00)	-3,67
5.1.02.01.01.0001	<b>Beban</b> Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	16.128.000,00	(16.128.000,00)	-100,00
5.1.02.01.01.0002	<b>Beban</b> Bahan-Bahan Kimia	464.000,00	-	464.000,00	-
5.1.02.01.01.0004	<b>Beban</b> Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.005.406,00	49.916.465,00	(3.911.059,00)	-7,84
5.1.02.01.01.0012	<b>Beban</b> Bahan-Bahan Lainnya	31.304.500,00	174.281.500,00	(142.977.000,00)	-82,04
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.734.000,00	-	5.734.000,00	-
5.1.02.01.01.0024	<b>Beban</b> Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.914.648,00	25.696.350,00	(15.781.702,00)	-61,42
5.1.02.01.01.0026	<b>Beban</b> Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	35.772.750,00	86.206.880,00	(50.434.130,00)	-58,50
5.1.02.01.01.0027	<b>Beban</b> Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.070.000,00	500.000,00	570.000,00	114,00
5.1.02.01.01.0029	<b>Beban</b> Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.310.750,00	8.373.750,00	(63.000,00)	-0,75
5.1.02.01.01.0030	<b>Beban</b> Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.182.500,00	4.355.850,00	(173.350,00)	-3,98
5.1.02.01.01.0031	<b>Beban</b> Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.987.500,00	1.973.660,00	13.840,00	0,70
5.1.02.01.01.0037	<b>Beban</b> Obat-Obatan-Obat	98.351.128,00	- 110.143.648,00	208.494.776,00	-189,29
5.1.02.01.01.0038	<b>Beban</b> Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	- 44.664.050,00	- 10.836.843,00	(33.827.207,00)	312,15
5.1.02.01.01.0039	<b>Beban</b> Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	358.815.442,00	388.245.000,00	(29.429.558,00)	-7,58
5.1.02.01.01.0052	<b>Beban</b> Makanan dan Minuman Rapat	577.410.000,00	583.240.000,00	(5.830.000,00)	-1,00
5.1.02.01.01.0053	<b>Beban</b> Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.200.000,00	-	10.200.000,00	#DIV/0!
5.1.02.01.01.0058	<b>Beban</b> Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	840.000,00	(840.000,00)	-100,00



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

KODE REK	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
5.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.100.000,00	-	7.100.000,00	-
<b>5.1.02.02</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>1.316.848.633,00</b>	<b>5.763.827.072,00</b>	<b>(4.446.978.439,00)</b>	<b>-77,15</b>
5.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1.303.358.633,00	3.983.247.072,00	(2.679.888.439,00)	-67,28
5.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	73.750.000,00	20.250.000,00	53.500.000,00	264,20
5.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	307.400.000,00	(276.800.000,00)	-90,05
5.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	354.150.000,00	1.932.050.000,00	(1.577.900.000,00)	-81,67
5.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	-	548.000.000,00	(548.000.000,00)	-100,00
5.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	205.200.000,00	205.200.000,00	-	0,00
5.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	17.824.000,00	31.350.000,00	(13.526.000,00)	-43,15
5.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	56.469.500,00	42.018.000,00	14.451.500,00	34,39
5.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	71.697.817,00	828.793.100,00	(757.095.283,00)	-91,35
5.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	-	52.000,00	(52.000,00)	-100,00
5.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.187.316,00	4.610.972,00	(2.423.656,00)	-52,56
5.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	64.480.000,00	63.523.000,00	957.000,00	1,51
5.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	13.490.000,00	24.380.000,00	(10.890.000,00)	-44,67
5.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.490.000,00	-	13.490.000,00	-
5.1.02.02.05.0025	Beban Sewa Bangunan Terbuka	-	24.380.000,00	(24.380.000,00)	-100,00
5.1.02.02.12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	1.756.200.000,00	(1.756.200.000,00)	-100,00
5.1.02.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	-	35.500.000,00	(35.500.000,00)	-100,00
5.1.02.02.12.0002	Beban Sosialisasi	-	1.421.450.000,00	(1.421.450.000,00)	-100,00
5.1.02.02.12.0003	Beban Bimbingan Teknis	-	299.250.000,00	(299.250.000,00)	-100,00
5.1.02.03	Beban Pemeliharaan	30.870.000,00	74.026.051,00	(43.156.051,00)	-58,30
5.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.870.000,00	52.651.051,00	(21.781.051,00)	-41,37
5.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	23.985.000,00	-	23.985.000,00	-
5.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	25.939.500,00	(25.939.500,00)	-100,00



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

KODE REK	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
5.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	-	18.941.551,00	(18.941.551,00)	-100,00
5.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.150.000,00	5.200.000,00	(50.000,00)	-0,96
5.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.285.000,00	1.375.000,00	(90.000,00)	-6,55
5.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	450.000,00	1.195.000,00	(745.000,00)	-62,34
5.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	21.375.000,00	(21.375.000,00)	-100,00
5.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	21.375.000,00	(21.375.000,00)	-100,00
5.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.785.684.749,00	607.905.280,00	1.177.779.469,00	193,74
5.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.785.684.749,00	607.905.280,00	1.177.779.469,00	193,74
5.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	669.304.749,00	607.905.280,00	61.399.469,00	10,10
5.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.478.800.000,00	-	2.478.800.000,00	-
5.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.478.800.000,00	-	2.478.800.000,00	-

### 5.2.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi-

Beban Penyusutan dan Amortisasi periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 846.245.333,69 dan 2023 adalah sebesar Rp. 1.146.111.195,00 dan mengalami Penurunan sebesar Rp. (299.865.861,31)

KODE REK	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>8.1.08</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>846.245.333,69</b>	<b>1.146.111.195,00</b>	<b>(299.865.861,31)</b>	<b>-26,16</b>
<b>8.1.08.01</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>682.939.130,00</b>	<b>980.610.830,00</b>	<b>(297.671.700,00)</b>	<b>-30,36</b>
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	4.085.700,00	4.085.700,00	-	0,00
8.1.08.01.01.0010	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	3.495.000,00	3.495.000,00	-	0,00
8.1.08.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	590.700,00	590.700,00	-	0,00



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

KODE REK	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	231.529.200,00	369.895.840,00	(138.366.640,00)	-37,41
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	26.685.000,00	26.685.000,00	-	0,00
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	95.050.900,00	106.708.900,00	(11.658.000,00)	-10,93
8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	-	38.874.000,00	(38.874.000,00)	-100,00
8.1.08.01.02.0015	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	109.793.300,00	197.627.940,00	(87.834.640,00)	-44,44
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	205.991.570,00	255.794.630,00	(49.803.060,00)	-19,47
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	31.701.600,00	36.638.400,00	(4.936.800,00)	-13,47
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.413.340,00	27.728.420,00	(13.315.080,00)	-48,02
<b>8.1.08.01.05.0006</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel</b>	<b>74.936.690,00</b>	<b>91.997.690,00</b>	<b>(17.061.000,00)</b>	<b>-18,55</b>
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.692.740,00	31.182.920,00	(14.490.180,00)	-46,47
8.1.08.01.05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	37.762.200,00	37.762.200,00	-	0,00
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.241.000,00	28.241.000,00	-	0,00
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	594.000,00	594.000,00	-	0,00
8.1.08.01.05.0018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	650.000,00	650.000,00	-	0,00
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	115.222.000,00	(115.222.000,00)	-100,00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-	57.611.000,00	(57.611.000,00)	-100,00
8.1.08.01.06.0012	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	-	57.611.000,00	(57.611.000,00)	-100,00
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	138.519.600,00	138.519.600,00	-	0,00
8.1.08.01.07.0003	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	138.519.600,00	138.519.600,00	-	0,00



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

KODE REK	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	102.813.060,00	97.093.060,00	5.720.000,00	5,89
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	84.158.435,00	79.138.435,00	5.020.000,00	6,34
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	18.654.625,00	17.954.625,00	700.000,00	3,90
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	163.306.203,69	165.500.365,00	(2.194.161,31)	-1,33
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	163.306.203,69	165.500.365,00	(2.194.161,31)	-1,33
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	116.527.412,82	116.162.719,00	364.693,82	0,31
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	36.873.246,00	38.587.446,00	(1.714.200,00)	-4,44
8.1.08.02.01.0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	9.905.544,87	10.750.200,00	(844.655,13)	-7,86

### Surplus / Defisit LO

Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. minus (9.383.210.693,69) mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.609.720.860,31 atau (14,64 %) dibandingkan periode per 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp (10.992.931.554,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### 5.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS – LPE SKPD

Laporan Perubahm Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas aras aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	URAIAN	2024	2023
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	10.100.602.650,76	9.864.370.604,76
2	SURPLUS DEFISIT LO	- 9.383.210.693,69	- 10.992.931.554,00



NO	URAIAN	2024	2023
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN (4 s.d 13)	- 212.165.360,00	-
	Koreksi Ekuitas Kas		
	Koreksi Ekuitas Piutang		
	Koreksi Nilai Persediaan		
	Koreksi Ekuitas Investasi		
	Koreksi Ekuitas Aset Tetap	- 300.000.000,00	-
	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	87.834.640,00	
	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	
	Koreksi Nilai Ekuitas Aset Lainnya		
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang (TPTGR)		
	Koreksi Ekuitas atas Kewajiban		
4	KEWAJIBAN UNTUK KONSOLIDASI	9.437.113.597,00	11.229.163.600,00
5	EKUITAS AKHIR (1+2+3)	9.942.340.194,07	10.100.602.650,76

### 5.3.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal Tahun 2024 adalah sebesar Rp.10.100.602.650,76 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.9.864.370.604,76

### 5.3.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. minus (9.383.210.693,69) dan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (10.992.931.554,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### 5.3.3 Dampak Komulatif perubahan kebijakan atau Kesalahan Menadasar Rp (0)

Dampak Komulatif perubahan kebijakan terhadap koreksi ekuitas aset tetap sebesar Rp. (300.000.000).

Dampak Komulatif perubahan kebijakan terhadap Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp 87.834.640,00.



### 5.3.4 Kewajiban untuk Konsolidasi

Kewajiban untuk Konsolidasi sebesar Rp. 9.437.113.597,00 untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 11.229.163.600,00

### 5.3.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp. 9.942.340.194,07 dan periode Tahun 2023 sebesar Rp 10.100.602.650,76

## 5.4 NERACA SKPD

### 5.4.1 Aset Lancar

Aset Lancar pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 1.063.179.906,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 503.821.294,00. Untuk lebih terperinci dilihat pada table dibawah ini.

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>1.063.179.906,00</b>	<b>503.821.294,00</b>
1.1.01	Kas dan Setara Kas		0
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		0
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		0
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		0
1.1.12	Persediaan	1.063.179.906,00	503.821.294,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	1.063.179.906,00	503.821.294,00
1.1.12.01.01	Bahan	114.409.856,00	68.990.806,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	114.409.856,00	68.990.806,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	948.770.050,00	434.830.488,00
1.1.12.01.04.0001	Obat	948.770.050,00	434.830.488,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.063.179.906,00</b>	<b>503.821.294,00</b>

### 5.4.2 Aset Tetap

#### 5.4.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki SKPD untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. tidak mengalami Kenaikan/penurunan nilai aset tetap Tanah .



#### 5.4.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 8.543.561.384,00 dan Rp. 8.514.961.384,00 Terdapat mutasi Penambahan peralatan dan mesin pada Tahun 2024 sebesar Rp. 28.600.000,00. Rincian aset tetap peralatan dan mesin terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan dan Penurunan	%
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.543.561.384,00	8.514.961.384,00	28.600.000,00	0,34
1.3.02.01	Alat Besar	40.857.000,00	40.857.000,00	0,00	0,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	0,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	5.907.000,00	5.907.000,00	0,00	0,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	3.963.571.700,00	3.963.571.700,00	0,00	0,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.973.452.000,00	2.973.452.000,00	0,00	0,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	988.139.700,00	988.139.700,00	0,00	0,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.349.189.914,00	2.349.189.914,00	0,00	0,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	668.005.800,00	668.005.800,00	0,00	0,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.672.934.114,00	1.672.934.114,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	288.055.000,00	288.055.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	288.055.000,00	288.055.000,00	0,00	0,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	703.597.754,00	703.597.754,00	0,00	0,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	703.597.754,00	703.597.754,00	0,00	0,00
1.3.02.10	Komputer	1.198.290.016,00	1.169.690.016,00	28.600.000,00	2,45
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.020.417.221,00	995.317.221,00	25.100.000,00	2,52
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	177.872.795,00	174.372.795,00	3.500.000,00	2,01

#### 5.4.2.3 Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 8.305.442.566,00 dan Rp. Rp. 8.293.252.941,00. Terdapat mutasi Penambahan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 12.189.625,00. Rincian aset tetap peralatan dan mesin terdapat pada tabel dibawah ini.



. Rincian asset tetap Gedung dan Bangunan terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.3.03	Gedung dan Bangunan	8.305.442.566,00	8.293.252.941,00	12.189.625,00	0,15
1.3.03.01	Bangunan Gedung	8.305.442.566,00	8.293.252.941,00	12.189.625,00	0,15
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.305.442.566,00	8.293.252.941,00	12.189.625,00	0,15
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	5.826.370.641,00	5.826.370.641,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	1.931.502.300,00	1.929.372.300,00	2.130.000,00	0,11
1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	547.569.625,00	537.510.000,00	10.059.625,00	1,87

#### 5.4.2.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp,00 dan Periode Tahun 2023 adalah Rp.00 Rp

#### 5.4.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan 2023 masing masing sebesar Rp. 7.970.743.671,55 dan 7.212.332.968,24.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap, untuk lebih terperinci dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel Aukumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.3.07	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>7.970.743.671,55</b>	<b>7.212.332.968,24</b>	<b>758.410.703,31</b>	<b>10,52</b>
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.732.768.684,00	6.137.664.194,00	595.104.490,00	9,70
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	15.161.400,00	11.075.700,00	4.085.700,00	36,89



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	3.066.686.200,00	2.922.991.640,00	143.694.560,00	4,92
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.938.722.094,00	1.732.730.524,00	205.991.570,00	11,89
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	288.055.000,00	288.055.000,00	0,00	0,00
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	511.138.154,00	372.618.554,00	138.519.600,00	37,17
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	913.005.836,00	810.192.776,00	102.813.060,00	12,69
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.237.974.987,55	1.074.668.774,24	163.306.213,31	15,20
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	1.237.974.987,55	1.074.668.774,24	163.306.213,31	15,20

## 5.4.2. Aset Lainnya

### 5.4.2.1 Aset Lain Lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp 772.615.600,00 dan Periode Tahun 2023 Rp 1.421.516.481 tidak mengalami penurunan sebesar Rp. (648.900.881,00).

Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.5	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>772.615.600,00</b>	<b>1.421.516.481,00</b>	-648.900.881,00	-45,65
1.5.04	Aset Lain-lain	772.615.600,00	1.421.516.481,00	-648.900.881,00	-45,65
1.5.04.01	Aset Lain-lain	772.615.600,00	1.421.516.481,00	-648.900.881,00	-45,65



## Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

*Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024*

1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	772.615.600,00	1.421.516.481,00	-648.900.881,00	- 45,65
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	772.615.600,00	1.421.516.481,00	-648.900.881,00	- 45,65

### 5.4.3. Ekuitas

Ekuitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 9.942.340.194,07 dan periode tahun 2023 sebesar dan Rp 10.100.602.650,76. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### 5.5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



**BAB V**

**INFORMASI NON KEUANGAN**

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu sub-unit yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jln. Imam Bonjol, Lorong Sarabiti - Sarotari Timur

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan sampai 31 Desember 2023. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga tenaga Non PNS yang terdidik dan terampil, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.1. Data Pegawai berdasarkan eselonering**

No	Eselon	Jenjang Pendidikan						Jumlah Pegawai
		SD	SLTP	SLTA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	II	-	-	-	-	1	-	1
2	III	-	-	-	-	2	1	3
3	IV	-	-	1	-	10	-	11
4	Non Eselon	-	-	4	1	-	-	5
<b>Jumlah</b>		-	-	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>20</b>

**Tabel 6.2 Data pegawai berdasarkan Golongan**

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2				1	1
2	S1				13	13
3	D3/D2/D1			1		1
4	SMA			4		7
5	SMP					
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>	<b>16</b>		<b>19</b>



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

*Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024*

**Tabel 6.3 Data Tenaga Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan						Jumlah Pegawai
		SD	SLTP	SLTA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Laki-Laki	-	1	4		2	-	7
2	Perempuan	-	-	1	1	3	1	5
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>12</b>



---

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pembaharuan terhadap Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur serta kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya Informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 31 Desember tahun anggaran 2024. Melalui Laporan Keuangan ini, diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Larantuka, Desember 2024

Kepala DP2KBP3A  
Kabupaten Flores Timur,

**Anselmus Yohanes Maryanto, S.Sos**  
NIP 196704201999703 1 001



Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

*Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2024*

---

**LAMPIRAN- LAMPIRAN BERITA ACARA**